

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

IMPLEMENTASI PROGRAM PERTAHANAN DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

Putra Yudha Wijaya Mukti¹

Agus Subagyo²

Dadang Sufianto³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : putrayudha01.py@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran program pertahanan dalam mempercepat pembangunan di provinsi Papua. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Temuan menunjukkan bahwa program pertahanan memiliki potensi signifikan dalam mempercepat pembangunan di Papua. Program-program ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan program pertahanan, seperti koordinasi yang suboptimal di antara para pemangku kepentingan, sumber daya yang terbatas, dan kompleksitas kondisi geografis dan sosial di Papua. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan sinergi antara Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengadopsi pendekatan teritorial yang komprehensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pertahanan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal, pemanfaatan teknologi, dan pembangunan kapasitas juga harus diprioritaskan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pertahanan, Percepatan Pembangunan, Papua

Abstract

This study aims to analyze the role of defense programs in accelerating development in the province of Papua. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, document analysis, and field

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

observations. The findings indicate that defense programs have significant potential in accelerating development in Papua. These programs not only focus on security aspects but also contribute to infrastructure development, improved accessibility, community empowerment, and strengthening of the local economy. However, there are several challenges in the implementation of defense programs, such as suboptimal coordination among stakeholders, limited resources, and the complexity of geographical and social conditions in Papua. Based on these findings, it is recommended to enhance synergy between the Ministry of Defense, local government, and other stakeholders, as well as adopt a comprehensive territorial approach in the planning and implementation of defense programs. Furthermore, empowering local communities, utilizing technology, and capacity building should also be prioritized.

Keywords: Policy Implementation, Defense Programs, Development Acceleration, Papua

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan bahwa “Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa: (1) negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan.

Wilayah Indonesia bagian Timur merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di Indonesia

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bagian Timur yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Permasalahan yang cukup signifikan dari daerah Indonesia bagian Timur khususnya Papua adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut, keterisolasi wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Indonesia bagian Timur khususnya di Provinsi Papua dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program pertahanan.

- a. Pendekatan Kesejahteraan; dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pendekatan Lingkungan; yaitu pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan; dan
- c. Pendekatan Keamanan, yaitu pendekatan yang memandang perlunya pengawasan terhadap keamanan wilayah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Pembangunan harus mengedepankan fungsi "*security*" dan fungsi "*prosperity*" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur. Dalam konteks ini, program pertahanan dilihat sebagai salah satu instrumen yang dapat memainkan peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:6): "penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Mengacu pada pandangan para ahli tersebut, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam fenomena mengenai Implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua yang merupakan objek alamiah, maka dari itu harus dilakukan pengkajian serta penelusuran secara lebih teliti dan komprehensif, bukan menarik secara umum atas hasil yang didapatkan.

KERANGKA TEORI

Menurut peneliti, istilah "kebijakan" dan "kebijaksanaan" memiliki arti yang berbeda dalam konteks ini. Hal ini didasarkan pada gagasan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bahwa konsep kebijakan membutuhkan pemikiran yang lebih, dan bahwa kebijakan mencakup aturan-aturan yang termasuk di dalamnya serta konteks politik karena pada intinya merumuskan kebijakan adalah proses politik yang komprehensif.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul (dalam Agustino, 2014:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Warwick (dalam Subarsono, 2005 : 99), dalam Implementasi Kebijakan terdapat faktor – faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: “(1) Kemampuan Organisasi, (2) Informasi, (3) Dukungan, (4) Pembagian Potensi”.

1. Kemampuan organisasi, dalam tahapan ini implementasi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan. Tiga komponen membentuk kapabilitas organisasi:

- a. Kemampuan untuk membangun ikatan dengan organisasi lain yang bergerak dalam organisasi yang sama dalam arti diperlukan koordinasi antara bagian-bagian yang relevan
- b. Kemampuan teknis
- c. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan organisasi lain, dan kemampuan untuk meningkatkan sistem pelayanan dengan membuat pedoman untuk alur kerja dalam memberlakukan kebijakan.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

2. Informasi. Kepemilikan informasi juga memainkan peran penting, karena dapat berdampak pada kebijakan itu sendiri.
3. Dukungan, Ketika ketentuan kebijakan bertentangan dengan keyakinan atau pilihan mereka, objek kebijakan tidak mau "terikat" pada tindakan atau kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka menurun.
4. Pembagian Potensi, Karena kendala yang tidak jelas dan implementasi yang terdesentralisasi, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab tidak sesuai dengan pembagian tugas.

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Webster (dalam Wahab, 2004:64) adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.)"

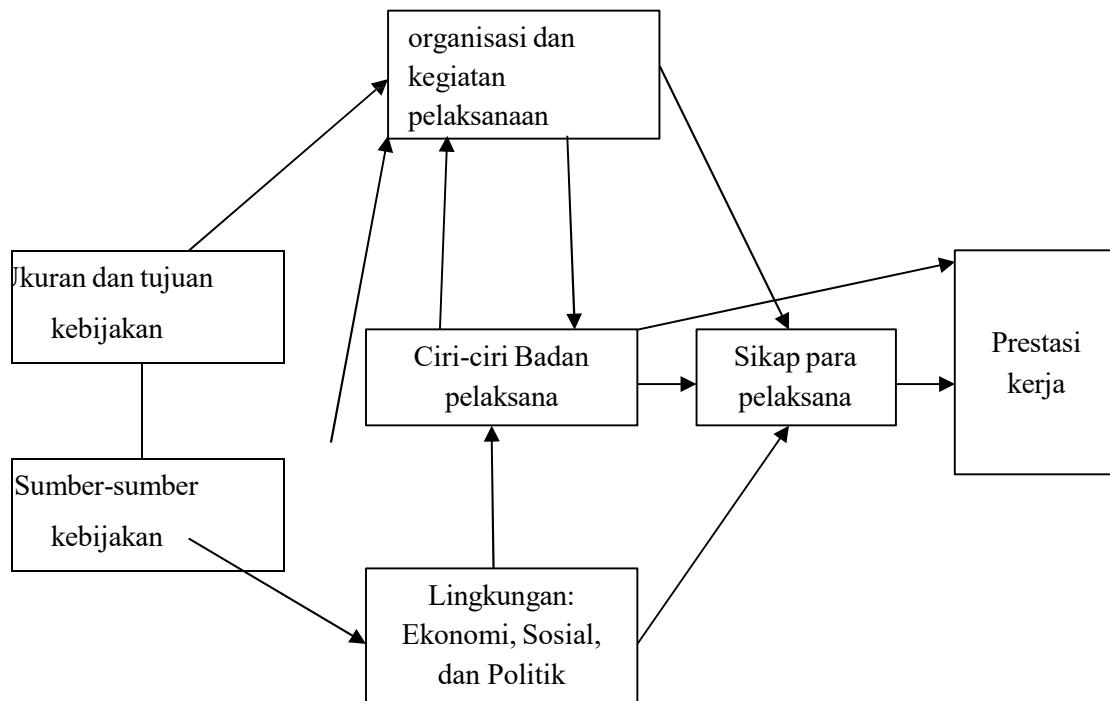
Pandangan Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2004:65) bahwa : Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok Badan Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Selanjutnya Suranto (dalam Mutiarin, 2014:19) menyatakan : secara

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat kongkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan- tujuan dan sasaran-saran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Hal lain yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (dalam Mutiarin, 2014:26) adalah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu:



*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

PEMBAHASAN

Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan bahwa “Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkatsingkatnya dan Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa: (1) negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan.

Wilayah Indonesia bagian Timur merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di Indonesia bagian Timur yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Permasalahan yang cukup signifikan dari daerah Indonesia bagian Timur khususnya Papua adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut, keterisolasi wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Keterisolasi wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah diantaranya adalah kekurangan pendanaan pemerintah daerah, sulitnya membangun sistem jaringan transportasi yang dapat melayani secara baik, serta kondisi jaringan jalan masih banyak yang rusak.

Peran TNI dalam Membangun Jalan Trans Papua

Pembangunan jalan trans Papua ini ternyata bukanlah perkara mudah. Sebagian besar jalan masih terputus dan tertutup hutan. Selain itu ancaman keamanan menjadi kendala. Dalam mewujudkan itu semua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih bekerja sama membangun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Papua. Pembangunan infrastruktur itu dapat membuka keterisolasi di beberapa wilayah yang ada di Papua. TNI AD diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah ini, yaitu membuka bakal jalan yang masih tertutup hutan. TNI AD mengerahkan satuan Zeni yang sudah disiapkan dan terlatih untuk membangun dan bertempur. Hal seperti ini yang tidak dimiliki instansi sipil.

TNI mendapatkan kepercayaan untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Zeni TNI AD sebagai mitra kerja. Zeni TNI AD membuka trans Papua yang belum terjamah oleh teknologi, selain itu para pekerja dari sipil tidak tahu ancaman-ancaman apa saja yang ada di tengah hutan. Jika kontraktor dilepas begitu saja, maka akan sulit untuk bekerja. Zeni TNI AD ikut membantu membuka jalan yang telah

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

direncanakan sebelumnya sehingga gangguan keamanan dapat diperkecil. Dengan diterjunkannya satuan Zeni TNI AD, seluruh pekerja bisa aman dan nyaman dalam mengerjakan pekerjaan trans Papua sesuai target dari pemerintah.

Implementasi Program Pertahanan Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Di Wilayah Provinsi Papua

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam yang sangat besar, namun masih mengalami berbagai tantangan dalam pembangunan. Salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua adalah melalui implementasi program pertahanan yang efektif.

Program pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara. Selain itu, program pertahanan juga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya keamanan yang terjamin, maka investasi dan pengembangan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lancar.

Kemampuan Organisasi

Implementasi program pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, namun juga memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, kemampuan organisasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program ini.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Informasi

Implementasi program pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya bergantung pada kemampuan organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan informasi yang akurat. Informasi yang tepat waktu dan relevan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Dukungan

Implementasi program pertahanan di Provinsi Papua tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat Papua. Dalam konteks teori implementasi kebijakan, dukungan masyarakat menjadi salah satu dimensi krusial. Ketika program pertahanan bertentangan dengan keyakinan atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Papua, maka akan muncul resistensi dan penolakan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan terhadap program tersebut, menghambat implementasinya, dan pada akhirnya menggagalkan upaya percepatan pembangunan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua

Provinsi Papua memiliki potensi alam yang sangat besar, namun wilayah ini juga memiliki tantangan tersendiri dalam hal pembangunan dan keamanan. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan program pertahanan yang efektif guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

meningkatkan kesiapan dan keberlanjutan program pertahanan di Provinsi Papua. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin merusak kestabilan daerah.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah dalam mengatasi kendala implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua

Pemerintah Indonesia menyadari kompleksitas tantangan dalam implementasi program pertahanan di Papua dan berkomitmen untuk mengatasinya melalui pendekatan komprehensif. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua, antara lain:

1. Penyelesaian Konflik Internal:

- a. Pemerintah secara aktif melakukan dialog dan negosiasi dengan kelompok separatis untuk mencari solusi damai dan mengakhiri konflik.
- b. Pemerintah meningkatkan program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Papua untuk mengatasi akar masalah konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerintah memperkuat kehadiran aparat keamanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan, serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

2. Peningkatan Infrastruktur:

- a. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Papua.

- b. Pemerintah memanfaatkan teknologi seperti satelit dan drone untuk mengatasi kendala geografis dalam pembangunan infrastruktur.
- c. Pemerintah menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

- a. Pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan di Papua.
- b. Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan pertahanan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- c. Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik benang merah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai 4 dimensi teori implementasi kebijakan yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi, serta wawancara dengan para informan terkait seperti perwakilan Bappeda Provinsi Papua, perwakilan Kodam (Kasdam XVII/Cenderawasih), dan perwakilan Kodim (Kasdim 1701/Jayapura), dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi program pertahanan di wilayah

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Provinsi Papua sangat penting.

2. Kemampuan organisasi yang kuat, akses terhadap informasi yang akurat, dukungan dari berbagai pihak terkait, dan pembagian potensi yang tepat merupakan faktor-faktor krusial yang mendukung keberhasilan implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI, dan berbagai instansi terkait lainnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif untuk pembangunan di Provinsi Papua. Dalam konteks Papua yang terkenal dengan potensi alamnya yang melimpah, implementasi program pertahanan yang efektif juga dapat menjadi penyangga dalam mengamankan sumber daya alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pertahanan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua.
3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua, diantaranya :
 - a. Salah satu kendala yang paling mendasar dalam implementasi program pertahanan di Provinsi Papua adalah konflik internal yang masih terus berlangsung antara kelompok separatis dan pemerintah Indonesia. Konflik ini telah menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut, serta mempengaruhi upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua.
 - b. Selain konflik internal, kendala lain yang dihadapi dalam implementasi program pertahanan di Papua adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Dalam rangka untuk mempercepat

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pembangunan di wilayah tersebut, pembangunan infrastruktur merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan secara serius.

c. Selain konflik internal dan kurangnya infrastruktur, kendala lain yang tidak kalah penting dalam implementasi program pertahanan di Papua adalah kurangnya partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan sebuah program pembangunan, namun dalam konteks Papua, masih banyak masyarakat yang belum terlibat secara aktif dalam pembangunan wilayah mereka

4. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala implementasi program pertahanan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua, antara lain:

a. Penyelesaian Konflik Internal:

1) Pemerintah secara aktif melakukan dialog dan negosiasi dengan kelompok separatis untuk mencari solusi damai dan mengakhiri konflik.

2) Pemerintah meningkatkan program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Papua untuk mengatasi akar masalah konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Pemerintah memperkuat kehadiran aparat keamanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan, serta melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan.

b. Peningkatan Infrastruktur:

1) Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Papua.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- 2) Pemerintah memanfaatkan teknologi seperti satelit dan drone untuk mengatasi kendala geografis dalam pembangunan infrastruktur.
 - 3) Pemerintah menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
- 1) Pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan di Papua.
 - 2) Pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan dan pertahanan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
 - 3) Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke- Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke- Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino, L. 2008. Dasar - Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Benoit, E. 1973. Defence and Economic Growth in Developing Countries. Lexington.
- Brasoveanu, Laura Obreja. 2010. The Impact of Defense Expenditure on Economic Growth”, Romanian Journal of Economic Forecasting – 4/2010. Diakses dari: <http://tni.mil.id/view-114827-tni-bangun-trans-papua- sepanjang-4325-km.html>.
- Hartley, Keith. 2005. Defence Spending and Its Impact on the National Economy: A Review of the Literature and Research Issue, Centre for Defence Economics, University of York, online-version.
- Mazmanian, & Sabatier, D. A. (n.d.). Implementation and Public Policy. Illionis : Scott, Foresman and Company.
- Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Remaja Rosdakarya.

Mutiarin, Dyah. 2014. Transformasi Birokrasi; Dari Proses Pembelajaran Organisasi Menuju Perkuatan Kelembagaan, *Jurnal Fisipol*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2004, Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi, Malang.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

Wahab, S. A. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Bumi Aksara.

Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.